

EDISI KEDUA



HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA

Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang
No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kata Sambutan
Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.



Hermansyah, S.H., M.Hum.

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah:

- Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia.
- Sumber dana perbankan di Indonesia.
- Jasa-jasa perbankan.
- Kredit bank dan jaminan.
- Surat-surat berharga dan warkat perbankan dalam praktik perbankan.
- Kerahasiaan bank.
- Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana.
- Tindak pidana di bidang perbankan.
- Pengaturan pidana di bidang perbankan.
- Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.
- Arsitektur Perbankan Indonesia.
- Otoritas jasa keuangan (OJK).

Pada Edisi Kedua ini terdapat penambahan topik bahasan penting: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa materi pokok tentang OJK yang dihadirkan dalam edisi ini adalah latar belakang pembentukan undang-undang OJK; pengertian, status, asas-asas, tujuan, fungsi, tugas, dan kewenangan OJK; hingga hubungan kelembagaan dan hubungan internasional OJK.



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	v
Pengantar Edisi Kedua	vii
Pengantar Edisi Pertama	ix

BAB 1 SISTEM KEUANGAN, SISTEM PERBANKAN, DAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA	1
--	----------

A. Sistem Keuangan.....	1
B. Sistem Perbankan.....	17
C. Hukum Perbankan.....	39

BAB 2 SUMBER DANA PERBANKAN DI INDONESIA	43
---	-----------

A. Dana yang Bersumber dari Bank Sendiri	45
B. Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas	45
C. Dana yang Bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.....	49
D. Dana yang Bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	54

BAB 3 KREDIT DAN JAMINAN BANK	57
--------------------------------------	-----------

A. Pengertian Kredit	57
B. Unsur-unsur Kredit	58

C. Jenis Kredit	60
D. Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit.....	61
E. Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank.....	62
F. Penggolongan Kredit Bank	66
G. Proses Pemberian Kredit Bank.....	68
H. Perjanjian Kredit Bank.....	71
I. Masalah Jaminan.....	72
J. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	75

BAB 4 JASA-JASA PERBANKAN 81

A. Pengiriman Uang (Transfer)	81
B. Inkaso.....	83
C. Kliring	85
D. Bank Garansi	87
E. Kotak Pengaman Simpanan (<i>Safe Deposit Box</i>)	89
F. Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	90
G. Perdagangan Valuta Asing (Valas)	92
H. Kustodian.....	93
I. <i>Letter of Credit</i> dalam Transaksi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri	93

BAB 5 SURAT-SURAT BERHARGA DAN WARKAT PERBANKAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN 103

A. Istilah dan Pengertian	103
B. Ciri-ciri Umum Surat Berharga	105
C. Persyaratan Umum Surat Berharga.....	107
D. Dasar Hukum Mengikat antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga.....	108
E. Surat-surat Berharga dan Warkat Perbankan dalam Praktik Perbankan.....	109
F. Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) atau Sukuk.....	123

BAB 6 RAHASIA BANK	131
A. Teori-teori Mengenai Rahasia Bank	131
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank Sebelum Berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	133
C. Rahasia Bank Menurut UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	135
 BAB 7 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA	 143
A. Perlindungan Tidak Langsung.....	146
B. Perlindungan Langsung	153
 BAB 8 TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN	 159
A. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Ekonomi.....	159
B. Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998	163
C. Tindak Pidana di Bidang Perbankan di Luar UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998	169
D. Penanganan Penyimpangan di Bidang Perbankan	170
 BAB 9 PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK OLEH BANK INDONESIA	 173
A. Pengaturan dan Pengawasan Bank Secara Umum	173
B. Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank Menurut UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Serta UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998	174

BAB 10 ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA	187
A. Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia.....	187
B. Fungsi dan Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia	190
C. Beberapa Alasan Mengenai Pentingnya Keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia	191
D. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia	192
E. Tantangan ke Depan	202
F. Program Kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia	206
G. Tahap-tahap Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia	209
 BAB 11 OTORITAS JASA KEUANGAN	 213
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan	213
B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	221
C. Status Otoritas Jasa Keuangan	221
D. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	222
E. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	225
F. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.....	228
G. Anggaran dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	230
H. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan	231
I. Hubungan Internasional Otoritas Jasa Keuangan	235
J. Masa Transisi Otoritas Jasa Keuangan	237
 DAFTAR PUSTAKA	 239
 LAMPIRAN	
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	246



B. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	258
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	275
D. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	312
TENTANG PENULIS	347